

Rekognisi dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Konteks Pendidikan Bela Negara Di Indonesia

Yayuk Hidayah¹, Ranto Praja Hamonangan²

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

² Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pearaja, Tarutung Sumatera Utara L-SAPIKA Indonesia

e-mail: yayukhidayah@uny.ac.id¹, ranto.praja.h@mail.ugm.ac.id²

Abstrak

Tulisan ini membahas rekognisi pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai pijakan utama dalam pendidikan bela negara yang efektif di Indonesia dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn memiliki potensi besar sebagai alat dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan yang kuat, membangun semangat nasionalisme, dan mengembangkan komitmen dalam mempertahankan negara. Namun, tetap saja ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegrasikan PKn ke dalam kerangka pendidikan bela negara seperti terjadi 1), ahistoris, 2), segregasi dikotomi rasial dan 3), lepas dari rahim Pancasila. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKn memiliki relevansi dalam pendidikan bela negara di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai stakeholder pendidikan, Indonesia dapat mempersiapkan generasi muda dengan baik dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian penelitian ini memberikan sumbangan dalam pemahaman mengenai keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bela negara, serta memberikan pandangan bagi perbaikan kebijakan pendidikan ke depan./6

Kata kunci: *Bela Negara, Indonesia, PKn, Rekognisi, Tantangan*

Abstract

This paper discusses the recognition of civic education (Civics) as the main foothold in effective state defense education in Indonesia and the challenges of citizenship education in the context of state defense education in Indonesia. The research method used is qualitative, literature study. The results showed that Civics has great potential as a tool in forming strong civic awareness, building the spirit of nationalism, and developing commitment in defending the country. However, there are still challenges that must be faced in integrating Civics into the framework of state defense education such as 1), ahistorical, 2), racial dichotomous segregation and 3), apart from the womb of Pancasila. This study concluded that Civics has relevance in state defense education in Indonesia. By involving various education stakeholders, Indonesia can prepare the younger generation well in facing various threats to state sovereignty. Thus, this research contributes to the understanding of the relationship between civic education and state defense education, and provides insights for future education policy improvements.

Keywords: *Defending the State, Indonesia, Civics, Recognition, Challenges*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran dalam mendukung peningkatan kualitas individu yang lebih baik sehingga terhindar dari ketertinggalan. Melalui pendidikan manusia berada dalam sebuah proses yang penting untuk perubahan baik secara individu ataupun kelompok. Hal ini berperan besar dalam membentuk sikap, karakter, pola pikir dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang baik menciptakan manusia yang baik pula. Dengan itu tercipta manusia yang berkualitas. Demikian juga dalam penerapannya terhadap pendidikan berbangsa dan bernegara. Bagi Bangsa Indonesia, pendidikan memiliki peran sebagai sarana dalam mewujudkan cita yang mulia sebagaimana tercantum dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan yang baik di Indonesia menciptakan kecerdasan bangsa Indonesia yang baik.

Di samping pentingnya pendidikan, ternyata terdapat tantangan dalam mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut. Hal tersebut menggugah kita untuk memberikan perhatian lebih agar dapat menghasilkan kehidupan bangsa yang cerdas. Hal tersebut berkaitan dengan pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara memiliki tujuan dalam menginternalisasi nilai-nilai patriotisme sehingga membentuk warga negara yang loyal dan memiliki semangat dalam memajukan negara. Seperti yang dikemukakan Abidin, Poernomo, Eryanti, & Arif (2014) bahwa Pendidikan Bela Negara merupakan cara untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan bela negara menumbuhkan cinta tanah air dan memberikan kemampuan awal bela negara, secara psikis maupun fisik.

Berkaitan dengan bela negara di Indonesia, Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) terdapat beberapa poin penting yang mengatur tentang pertahanan nasional Indonesia yaitu tentang Pertahanan Nasional, Kewajiban Pertahanan, Pemerintahan Pertahanan, Angkatan Bersenjata, Sumber Daya Manusia, Kerjasama Internasional dan Keamanan Dalam Negeri. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam hal ini pendidikan bela negara bagi warga negara perlu digalakkan guna menunjang terbentuknya warga negara yang memiliki nilai bela negara baik secara intelektual dan atau secara moral.

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) mengamanatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diajarkan di semua tingkatan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan pendidikan bela negara di Indonesia, dalam hal ini PKn menyediakan landasan teoritis dan pemahaman tentang negara karena dalam PKn memberikan pemahaman tentang nilai demokrasi, hak dan kewajiban, karakter bangsa serta wawasan kebangsaan. Sejalan dengan hal tersebut, Payne et al (2019) mengemukakan bahwa PKn memberi anak-anak lebih banyak kebebasan untuk bertindak sehingga kemampuan kewarganegaraan mereka akan berkembang. Dengan demikian PKn mengemban misi pendidikan bela negara karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang komprehensif dan bertanggung jawab.

Peneliti berpandangan jika hubungan antara PKn dan Pendidikan Bela Negara sangat erat karena keduanya bertujuan untuk membentuk kesadaran kebangsaan, loyalitas, dan komitmen warga negara terhadap negara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sunarso, dkk (2006) yang berpandangan jika PKn merupakan pendidikan yang memiliki koridor pendidikan berbasis nilai yang bertujuan membangun kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam hal pendidikan bela negara. Dalam konteks ini, penelitian ini membantu dalam meningkatkan efektivitas sistem pendidikan dalam membentuk kewarganegaraan yang berkualitas dan tanggap terhadap kebutuhan negara sebagaimana dinyatakan oleh Gainous & Martens (2011) bahwa pendidikan kewarganegaraan mempengaruhi kapasitas demokrasi bagi siswa dengan menggunakan metode pengajaran yang lebih luas oleh guru.

Pentingnya menggali lebih dalam tentang Rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara mengacu pada pemahaman bahwa ada masalah atau tantangan yang mendesak dan serius yang memerlukan perhatian segera dan tindakan

yang tepat. Dalam konteks penelitian ini, *sense of crisis* adalah memahami bagaimana faktor yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Bela Negara di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya pendidikan transformatif untuk mendorong keterlibatan masyarakat demi masyarakat yang lebih berkeadilan secara sosial dan ekonomi (Loberg, 2022). Konsep Rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara mengacu pada pemahaman dan pengakuan atas peran penting PKn dalam membentuk kewarganegaraan yang aktif dan tanggap terhadap kebutuhan negara dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pendidikan Bela Negara, di sisi lain, menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab warga negara terhadap pertahanan dan keamanan nasional.

Beberapa kajian terdahulu tentang pendidikan bela negara antara lain tentang pendidikan bela negara dalam kurikulum di Indonesia (Muhtar, Yulianti, & Hanafiah, 2021), urgensi pendidikan bela negara (Hasyim, Utama, & Setiawan, 2022), karakter solidaritas lintas batas (Bocking, 2020), penerapan pendidikan bela negara pada untuk Perguruan Tinggi (Gredinand, 2017), Pendidikan bela negara tonggak patriotisme (Rahmat, J, & Marzuki, 2018).

Dari berbagai penelitian terdahulu tentang pendidikan bela negara tersebut, keterbaruan dalam tulisan ini adalah mengembangkan model integratif yang menggabungkan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan bela negara secara efektif. Dalam kajian ini, penelitian mencakup panduan praktis bagi lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan dua konsep dalam kurikulum mereka. Penelitian dapat mengusulkan pendekatan partisipatif yang lebih kuat di mana siswa, guru, dan masyarakat lokal terlibat aktif dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pendidikan kewarganegaraan dan bela negara.

Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah bagaimana Rekognisi tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara Di Indonesia? Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap teori pendidikan kewarganegaraan yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat diakomodasi dalam konteks pendidikan bela negara di Indonesia. Hal ini akan membantu mengembangkan teori baru atau menguatkan teori-teori yang ada dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Sementara secara praktis diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi pihak berwenang dalam pengembangan kurikulum pendidikan bela negara di Indonesia. Informasi ini dapat membantu mereka untuk memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian integral dari pendidikan bela negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga negara tentang tanggung jawab mereka terhadap negara.

METODE

Meneliti tentang Rekognisi dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara di Indonesia, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada pendapat Creswell (2010) yang menyatakan jika penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dengan menggunakan kata-kata. Peneliti menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat lebih luas dan detail serta mendalam dalam membahas Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif krisis yang menekankan pada kekuatan analisis data berdasarkan sumber yang meneliti peroleh sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman & Soerjono (1999) bahwa dalam deskriptif krisis ialah menginterpretasikan secara jelas berbagai data guna menghasilkan tesis dan anti tesis.

Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada model studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang terkait dengan Pendidikan

Kewarganegaraan dan Pendidikan Bela Negara yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

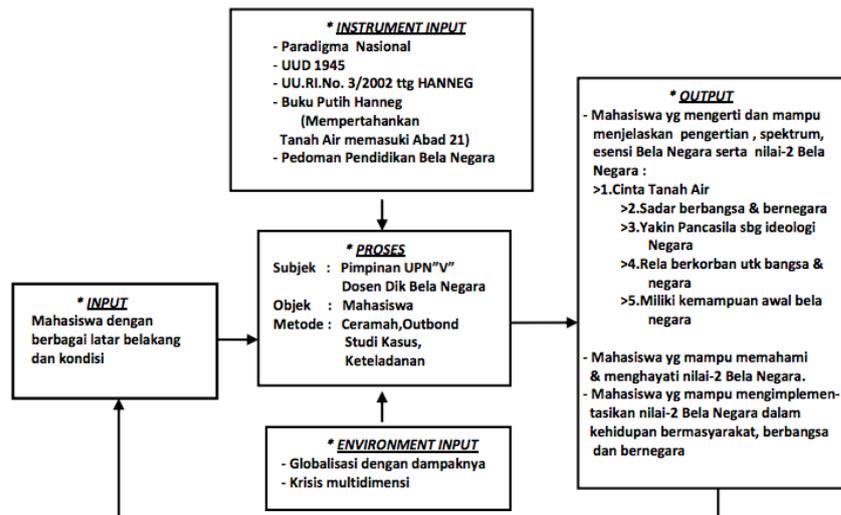
Rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Bela Negara Di Indonesia

Penelitian ini menggarisbawahi dan menekankan adanya rekognisi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara di Indonesia. Hal tersebut adalah substansi pendidikan bela negara sehingga siswa memiliki pemahaman dalam bernegara, memegang nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan bersedia untuk berkontribusi positif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan adalah landasan yang krusial dalam membangun kesadaran bela negara di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah lakukan terkait rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara di Indonesia, didapat hasil jika PKn memiliki potensi besar sebagai alat untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan yang kuat, membangun semangat nasionalisme, dan mengembangkan komitmen dalam mempertahankan negara. Pada konteks tersebut, PKn memiliki potensi besar sebagai alat untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan yang kuat di kalangan masyarakat.

PKn adalah mata pelajaran yang dirancang untuk memperkenalkan warga negara muda pada prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai kewarganegaraan yang esensial. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Somantri (2001) yang mengemukakan jika pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara di Indonesia mengacu pada substansi PKn dalam membangun semangat nasionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika dalam PKn pembelajaran tentang pemahaman sejarah, nilai-nilai cinta tanah air maka akan dapat mengembangkan rasa cinta dan identitas nasional yang kuat dalam diri siswa. Temuan tersebut serupa dengan pendapat Haduong et al (2023) yang menegaskan jika PKn dapat mendorong perkembangan identitas kewarganegaraan generasi muda dan mendukung berfungsinya demokrasi. Sebagaimana dimaksud dalam pernyataan tersebut, Dalam hal ini PKn menjadi aset penting dalam menjaga persatuan dan solidaritas dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia, Secara lebih lanjut, Abidin et al (2014) menggambarkan pola pikir pendidikan bela negara dalam gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Pola Pikir Pendidikan Bela Negara
Sumber: (Abidin et al., 2014)

Dari gambar 1 tentang Pola Pikir Pendidikan Bela Negara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat instrument input, proses, output dan *environment input* dalam Pendidikan Bela Negara. Amrullah & Hidayah (2023) mengemukakan bahwa PKn mengembangkan komitmen dalam mempertahankan negara pada warga negara, Melalui penelitian ini, mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat memotivasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam menjaga stabilitas negara. Melalui pembelajaran PKn siswa dapat memahami pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional serta berkontribusi dalam upaya-upaya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan praktis dalam PKn, di mana siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial dan politik di lingkungan mereka. Hidayah, Trihastuti, & Romlah (2023) menyatakan jika PKn menjadi wahana dalam meningkatkan pengetahuan siswa sebagai warga negara. Pada dasarnya, efektivitas PKn sebagai pendidikan bela negara yang menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan pada siswa juga melibatkan peran guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang inspiratif dan relevan dengan konteks siswa. Temuan tersebut senada dengan pernyataan Bocking (2020) bahwa jika internasionalisme guru menjadi semakin penting karena kemampuannya mengartikulasikan analisis bersama mengenai karakter kebijakan pendidikan global yang didominasi neoliberal dan mengkoordinasikan solidaritas lintas batas. Pada konsep lainnya, peneliti juga menemukan bahwa pengembangan kurikulum PKn yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan bela negara dalam PKn.

Menyoroti tentang pendidikan bela negara dan PKn akan menjadi penekanan bahwa pendidikan bela negara bukan hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga melibatkan pelatihan fisik dan mental. Bilamana cakupan pendidikan bela negara dalam PKn tersalurkan dengan baik pada siswa, maka pendidikan bela negara akan berhasil. Sejalan dengan hal tersebut, Abidin et al (2014) mengemukakan bahwa pendidikan kesadaran bela negara berperan penting untuk membangkitkan kesadaran setiap dan seluruh warga negara akan hak dan kewajibannya dan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan negara.

Pendidikan Bela Negara mempromosikan partisipasi aktif dari warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Sautereau & Faas (2022) menyatakan jika wacana makro-politik seputar dalam pembentukan kurikulum mata pelajaran dapat mempromosikan identitas nasional. Dalam segi pembelajaran PKn, Siswa diajarkan bagaimana berpartisipasi dalam proses demokratis seperti mengemukakan pendapat mereka secara damai. Ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang aktif dan terlibat dalam pembangunan negara.

Terdapat dampak rangsangan informasi dan pengalaman terhadap preferensi kebijakan pendidikan (Houston, 2019). Pendidikan Bela Negara mencakup persiapan dalam menghadapi situasi darurat atau bencana nasional. Dalam hal ini, PKn berkomitmen dalam pembentukan kewarganegaraan yang kuat dan menjaga stabilitas bangsa Indonesia. Adapun terjadinya polarisasi dan depolarisasi opini masyarakat terhadap pendidikan Bela Negara menjadi peluang bagi PKn untuk mengintegrasikan konsep pendidikan Bela Negara sehingga terciptanya warga negara yang cerdas dan berwawasan bela negara.

Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Bela Negara Di Indonesia

Berdasarkan penelitian tentang rekognisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Bela Negara di Indonesia, ditemukan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mengintegrasikan PKn pada kerangka pendidikan Bela Negara. Seperti temuan yang disampaikan oleh Lo & Kisa (2021) bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai potensi mendorong pengembangan pengetahuan, minat, dan keterlibatan kewarganegaraan siswa, namun juga mengisyaratkan terdapat kesenjangan yang meresahkan terhadap pemikiran tentang kurikulum dalam pendidikan kewarganegaraan.

Mengintegrasikan PKn pada kerangka pendidikan Bela Negara terkait erat dengan kurikulum serta metode pembelajaran. Sebab, kurikulum yang baik sesuai zaman serta metode pembelajaran yang inovatif (tepat pada pelajar di masanya) akan memberikan *output* yang optimal karena proses selalu beriringan dengan hasil. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Molla, Melesse, & Melesse (2022) bahwa dalam pengembangan kurikulum terdapat berbagai karya empiris sebagai refleksi untuk mengintegrasikan PKn pada kerangka pendidikan Bela Negara, terkait dengan hal ini, penulis menyampaikan beberapa poin yang menjadi tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan pada kerangka pendidikan Bela Negara, yaitu: 1). *Ahistoris*, 2). Segregasi dikotomi rasial dan 3). Lepas dari rahim Pancasila.

Ahistoris adalah kondisi peserta didik tidak acuh atau memperdulikan sejarah bangsa secara menyeluruh, atau bisa dikatakan tidak menguasai sejarah bangsa sendiri. Subjek yang adalah nara didik yang seharusnya menjadi sumber primer sejarah bangsa (warga Indonesia) terputus. Sumber primer yang adalah orang langsung atau sumber utama sebagai pelaku sejarah, regenerasi menghadapi *ahistoris*, subjek sejarah menjadi kabur tidak akurat. Terjadi kegagalan dalam membulatkan pengetahuan sejarah bernegara secara holistik. Sejarah dalam membela negara tidak holistik. Terjadi narasi parsial dalam melihat sejarah perjuangan Negara Indonesia yang begitu panjang. Bangsa yang dibangun atas dasar darah dan nyawa para pejuang bangsa menjadi parsial. Sifatnya tidak menyeluruh melainkan bagian yang terpisah-pisah. Lebih lagi bercorak kepentingan kelompok yang memiliki tendensi tertentu, tidak menyeluruh sebagai kisah sejarah perjuangan Negara Indonesia yang panjang dalam menjaga persatuan dan kemerdekaan. Terjadi narasi sejarah Indonesia merdeka dari narasi Agama dan kelompok sendiri sehingga meng-*exclude* warga negara yang lain. Tidak menjadi sejarah yang satu. Terjadi mengabaikan fakta maupun sejarah bahwa setiap orang Indonesia berhak di Indonesia karena sejarah mengatakan bahwa Negara Indonesia merdeka karena diperjuangkan. Kemerdekaan yang diraih bersama, untuk itu tidak boleh ada pembelokan sejarah. Bangsa yang tidak tahu sejarah akan kehilangan arah dan tujuan. Hal ini menjadi tantangan bersama dalam mengintegrasikan PKn pada kerangka pendidikan Bela Negara yang bertujuan mendidik agar warga negara dapat memahami dan mengetahui sejarah dan kenyataan bangsa. Sejarah kemerdekaan bangsa harus bersifat *holistic*. Bangsa yang diperjuangkan bersama dan dibela bersama.

Selanjutnya, hasil penelitian menemukan bahwa terjadi segregasi dikotomi agama dan rasial. Dalam hal ini, Maso'ed & Maksu (2000) telah menyampaikan jika sentimen agama telah dan masih menjadi pendorong utama timbulnya konflik yang bersifat kekerasan yang sering terjadi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Artinya terjadinya pemisahan satu kelompok ras/etnis dari kelompok yang lain. Menariknya hal ini terjadi dalam (sekitar

dunia pendidikan. Di sekitar kampus yang membuat syarat rasial Kosan Muslim atau adanya Masjid Kampus dan lainnya. Sementara itu, bela negara adalah kewajiban atau tanggung jawab individu atau warga negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara sebagaimana dinyatakan oleh Widodo (2011) bahwa bela negara adalah perilaku dan langkah-langkah yang diwujudkan oleh warga negara dengan dasar kasih kepada tanah air, kesadaran identitas nasional, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, serta kesiapan untuk berkorban dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, rintangan, dan gangguan.

Diskriminasi dan bela negara adalah dua konsep yang berbeda tetapi dapat memiliki hubungan ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kewarganegaraan. Segregasi dikotomi agama dan rasial memiliki dampak yang signifikan terhadap kesetaraan dalam Pendidikan. Terkait dengan hal ini, Lumby & Moorosi (2022) mengemukakan jika Manajemen, Administrasi dan Kepemimpinan Pendidikan telah mewujudkan nilai-nilai, konsep dan praktik bidang kepemimpinan pendidikan selama 50 tahun dan berperan dalam menentang atau mempertahankan kesenjangan dalam pendidikan. Jika dikaitkan dengan segregasi dikotomi agama, bagaimana mungkin pendidik mengajarkan membela negara namun dia sendiri didiskriminasi? Jika ada kriteria "Kosan Muslim" maka harus ada juga indeks buat agama yang lain. Mereka yang agamanya berbeda harus diberi ruang indeks. Demikian juga jika ada rumah ibadah agama tertentu di kampus (universitas), negara juga harus memfasilitasi agama yang lain. Harus menjamin setiap warga negara dalam setiap agamanya. Demikian juga adanya bahasa religious mayoritas seperti Assalamu'alaikum Wr. Wb dalam ranah Pendidikan. Jika menggunakan hal tersebut, haruslah menggunakan bahasa agama yang lain. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Selamat Sejahtera bagi kita semua. Hal ini menjadi jaminan dan penghargaan adanya kepastian dalam negara yang nasionalis. Tidak memihak pada mayoritas, haruslah mengucapkan salam dari agama yang diakui. Tidak hanya menonjolkan yang mayoritas. Hal ini adalah *superiority*. Dengan mengucapkan salam dari semua agama pelajar dapat membela negara yang nasionalis, tidak rasial yang parsial. Mereka tahu bahwa negara yang dipertahan dan dibela adalah negara bersama. bukan negara milik mayoritas. Diskriminasi seperti ini bisa memicu konflik dan pemberontakan atas hak mereka sebagai warga negara yang merdeka tanpa diskriminasi.

Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan PKn pada kerangka pendidikan Bela Negara agar tidak lepas dari rahim Pancasila. Artinya lahir dari Rahim Pancasila adalah kenyataan yang harus dijalani. Rahim itu telah melahirkan Indonesia yang majemuk dan heterogen. Suseno (2005) menyatakan jika pentingnya menghormati keanekaragaman sosial sebagai salah satu prinsip yang esensial untuk menjaga persatuan Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara di Indonesia karena harus mampu menghilangkan narasi yang cenderung homogen. Sebab, kita lahir dari rahim Pancasila adalah rumah atas keberagaman. Satu satunya yang menjadi kita bersama adalah Pancasila. Kita lahir dari rahim Ibu pertiwi menjadi sebuah negara yang bernama Indonesia. Kenyataan yang beragam tersebut harus dijaga bersama dalam setiap pergerakan dan pergeseran warga negara. Tidak dapat dipungkiri terjadi perpindahan penduduk dan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada pergeseran demografi. Khususnya mahasiswa yang setiap tahun jumlahnya ribuan dan jutaan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk studi di Universitas atau sekolah tinggi.

Kekhawatiran terhadap pergeseran demografi terus menimbulkan perselisihan di semua tingkat pemerintahan (Brown, 2013). Kemajemukan dan heterogen adalah tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegrasikan PKn pada kerangka pendidikan Bela Negara karena Indonesia ada sudah beragam. Untuk itu, narasi mayoritas minoritas hanya memecah belah kelompok. Karena mayoritas di tempat tertentu berbeda-beda, di Bali Hindu, di Mentawai Kristen dan juga di tempat atau lokasi tertentu dominasi agama tidak ada yang seimbang. Selalu ada mayoritas minoritas. Tidak bisa dipaksakan mayoritas-minoritas

karena kita ada dalam ideologi Pancasila. Terlahir dari Rahim yang adalah rumah atas keberagaman. Tantangan terbesar adalah mengamalkan dan menerapkan jiwa Pancasila.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rekognisi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan bela negara di Indonesia peneliti dapat menyimpulkan jika PKn sebagai mata pelajaran memiliki potensi besar sebagai alat untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan yang kuat, membangun semangat nasionalisme, dan mengembangkan komitmen dalam mempertahankan negara. PKn dapat mempersiapkan generasi muda dengan baik dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti ahistoris, segregasi dikotomi rasial dan lepas dari rahim Pancasila. Melalui penelitian ini, peneliti menegaskan jika dibutuhkannya kajian yang lebih mendalam tentang PKn sekolah dan Pendidikan bela negara pada setiap jenjangnya dalam mengintegrasikan PKn ke dalam kerangka pendidikan Bela Negara meliputi pengembangan kurikulum yang terkoordinasi, pelatihan guru yang tepat, serta pendekatan pembelajaran yang inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., & Soerjono. (1999). *Metode penelitian deskriptif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abidin, Z., Poernomo, D., Eryanti, E., & Arif, L. (2014). *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. Surabaya: UPN "Veteran" Jatim.
- Amrullah, M. K., & Hidayah, Y. (2023). Kebajikan Kewarganegaraan Partisipasi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan di Tingkat Pemerintahan Administratif Desa di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1838>
- Bocking, P. (2020). The Trinational Coalition in Defense of Public Education and the Challenges of International Teacher Solidarity. *Labor Studies Journal*, 45(1), 114–134. <https://doi.org/10.1177/0160449X20901649>
- Brown, D. (2013). Legislating language in the name of national unity: An Oklahoma story. *International Journal of Discrimination and the Law*, 13(1), 4–17. <https://doi.org/10.1177/1358229113480431>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Gainous, J., & Martens, A. M. (2011). The Effectiveness of Civic Education: Are "Good" Teachers Actually Good for "All" Students? *American Politics Research*, 40(2), 232–266. <https://doi.org/10.1177/1532673X11419492>
- Gredinand, D. (2017). PENERAPAN PENDIDIKAN BELA NEGARA DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 3(2). Diambil dari <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPD/article/view/45>
- Haduong, P., Jeffries, J., Pao, A., Webb, W., Allen, D., & Kidd, D. (2023). Who am I and what do I care about? Supporting civic identity development in civic education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 17461979231151616. <https://doi.org/10.1177/17461979231151616>
- Hasyim, I., Utama, A. P., & Setiawan, B. (2022). Urgensi Pendidikan Bela Negara Dalam Membentuk Kecerdasan Sosial Peserta Didik Sebagai Daya Dukung Pertahanan Negara. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*. Diambil dari <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijssse>
- Hidayah, Y., Trihastuti, M., & Romlah, O. Y. (2023). Improving the Quality of Legal Awareness on Digital Citizenship in Citizenship Education Remotely. In *4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022)*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_73
- Houston, D. M. (2019). Polarization and the Politics of Education: What Moves Partisan Opinion? *Educational Policy*, 35(4), 566–589.

- <https://doi.org/10.1177/0895904818823745>
- Lo, J. C., & Kisa, Z. (2021). Requiring Civics Then and Now: Potentials and Pitfalls of Mandated Civics Curriculum. *Teachers College Record*, 123(2), 1–42. <https://doi.org/10.1177/016146812112300202>
- Loberg, K. K. (2022). Revisiting Highlander and Its Theoretical Origins for Civic Education. *Journal of Transformative Education*, 20(3), 226–240. <https://doi.org/10.1177/15413446221103193>
- Lumby, J., & Moorosi, P. (2022). Leadership for equality in education: 50 years marching forward or marching on the spot? *Educational Management Administration & Leadership*, 50(2), 233–251. <https://doi.org/10.1177/17411432211064425>
- Maso'ed, M., & Maksum, M. (2000). *Kekerasan Kolektif, Kondisi, dan Pemicu*. Yogyakarta.: P3PK UGM.
- Molla, A., Melesse, S., & Melesse, T. (2022). Practitioners' Curriculum Conceptualization and Their Professional Participation in Curriculum Development and Implementation in Ethiopia. *Journal of Education*, 203(4), 984–991. <https://doi.org/10.1177/00220574221088504>
- Muhtar, Z., Yulianti, Y., & Hanafiah, H. (2021). Pendidikan Bela Negara di dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/eduprof.v3i2.86>
- Payne, K. A., Adair, J. K., Colegrove, K. S. S., Lee, S., Falkner, A., McManus, M., & Sachdeva, S. (2019). Reconceptualizing civic education for young children: Recognizing embodied civic action. *Education, Citizenship and Social Justice*, 15(1), 35–46. <https://doi.org/10.1177/1746197919858359>
- Rahmat, J. W., & Marzuki, M. (2018). PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI TONGGAK PERADABAN JIWA PATRIOTISME GENERASI MUDA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p186-191>
- Sautereau, A., & Faas, D. (2022). Comparing national identity discourses in history, geography and civic education curricula: The case of France and Ireland. *European Educational Research Journal*, 22(4), 555–571. <https://doi.org/10.1177/14749041221086378>
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunarso, D. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNYPress.
- Suseno, F. M. (2005). *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(1). Diambil dari <https://core.ac.uk/download/pdf/234022369.pdf>